

ANALISIS KEMANDIRIAN EKONOMI WARGA DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (PPMK) DI SEMPER BARAT

Eka Wahyu Hidayat¹ Allene Hileary Tandilangi²

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya

²Mahasiswa Prodi Administrasi Negara FISIP Universitas Jayabaya

Abstrak

Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi masyarakat perkotaan melalui akses modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan penguatan produksi lokal. Sinergi antara program pemerintah dan lembaga terkait berperan penting dalam memastikan efektivitas pemberdayaan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan sosial. Selain itu, pengembangan infrastruktur turut mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan membuka akses ke pasar yang lebih luas. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan fokus pada kemandirian ekonomi warga Semper Barat dalam konteks program PPMK. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta analisis dokumen terkait. Teknik triangulasi data digunakan untuk meningkatkan validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPMK berkontribusi signifikan dalam membangun usaha mandiri yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi ketergantungan ekonomi pada pihak luar. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi program, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan kendala birokrasi, masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, dukungan pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat diperlukan guna memastikan keberlanjutan kemandirian ekonomi yang telah terbentuk. Dengan pendekatan strategis dan inklusif, PPMK dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: pemberdayaan masyarakat, kemandirian ekonomi, program PPMK, kebijakan ekonomi lokal

Abstract

The Kelurahan Community Empowerment Program (PPMK) is a government initiative aimed at enhancing the capacity and economic independence of urban communities through access to business capital, entrepreneurship training, and the strengthening of local production. The synergy between government programs and relevant institutions plays a crucial role in ensuring the effectiveness of economic empowerment and the improvement of social welfare. Additionally, infrastructure development accelerates economic growth by expanding market access. This study employs a case study approach, focusing on the economic independence of Semper Barat residents within the context of the PPMK program. Data were collected through in-depth interviews, participatory observations, and document analysis. A data triangulation technique was used to enhance the validity of the findings. The results indicate that PPMK has made a significant contribution to fostering sustainable independent businesses, increasing household incomes, and reducing economic dependence on external parties. Nevertheless, challenges in program implementation—such as low community participation, limited resources, and bureaucratic constraints—remain key obstacles. Therefore, support from the government, private sector, and community organizations is essential to ensure the sustainability of the established economic independence. With a more strategic and inclusive approach, PPMK can serve as an effective instrument in improving community welfare and economic self-sufficiency.

Keywords: *Community empowerment, economic independence, PPMK program, local economic policy*

PENDAHULUAN

Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) merupakan salah satu inisiatif yang diusung oleh pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi masyarakat di daerah perkotaan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menyebutkan “Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” atau Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 menyatakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri. Program pemberdayaan masyarakat seperti PPMK sering kali didasarkan pada konsep pembangunan ekonomi inklusif dan berbasis komunitas. Tujuannya adalah untuk mengatasi kemiskinan melalui pemberian akses kepada sumber daya, pelatihan keterampilan, dan peningkatan kualitas infrastruktur di tingkat lokal. Menurut teori pemberdayaan, keberhasilan program semacam ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi, yang memastikan bahwa solusi yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal (Batu Menyan sebagaimana dikutip Puspitasari, E.M., 2024).

Pendekatan pemberdayaan ekonomi sering kali melibatkan peningkatan akses terhadap modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan peningkatan kapasitas produksi lokal. Dalam hal ini, sinergi antara berbagai program pemerintah dan lembaga terkait juga sangat penting agar hasilnya maksimal, baik dalam aspek pemberdayaan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan sosial (Kemenko PMK, 2021). Selain itu, pengembangan infrastruktur seperti akses jalan, listrik, dan sarana komunikasi dapat mempercepat proses peningkatan taraf hidup dengan mempermudah akses ke pasar dan peluang ekonomi lainnya.

Kemandirian ekonomi warga menjadi salah satu indikator penting dalam menilai

keberhasilan suatu program pemberdayaan karena mencerminkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Sen (1999) menekankan bahwa pemberdayaan ekonomi berkaitan dengan perluasan pilihan yang dimiliki individu, yang mencakup akses ke pasar, pelatihan, dan modal usaha yang memungkinkan mereka untuk berkembang secara mandiri. Dengan kemandirian ekonomi, warga tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan komunitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Program pemberdayaan yang berfokus pada peningkatan kemandirian ekonomi sangat penting untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Dengan adanya PPMK, diharapkan warga Semper Barat mampu mengembangkan usaha kecil, memanfaatkan potensi lokal, serta meningkatkan partisipasi dalam kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan, tetapi juga mencakup perbaikan dalam hal pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Hal tersebut dilihat dengan pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya yang menunjukkan bahwa masih kurang, misalnya, tingkat melek huruf yang masih rendah di beberapa daerah (Badan Pusat Statistik, 2023), angka penyakit yang tinggi akibat akses layanan kesehatan yang terbatas, serta kebutuhan dasar seperti air bersih dan sanitasi yang belum terpenuhi dengan baik. Situasi ini mencerminkan perlunya pendekatan lebih dalam pada program pemberdayaan, di mana semua aspek kehidupan masyarakat harus diperhatikan secara bersamaan agar pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai. Dengan demikian, sinergi antara peningkatan ekonomi dan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya merupakan faktor penentu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Melalui program ini, warga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan ekonomi dari pemerintah atau pihak luar, serta menciptakan lapangan pekerjaan baru yang berdampak positif bagi komunitas.

Penelitian ini didasarkan pada berbagai penelitian terdahulu, menurut penelitian yang

dilakukan oleh Maghfiroh *et al* (2021), pemberdayaan dengan meningkatkan aset produktif dapat meningkatkan kemandirian masyarakat. Studi tersebut menemukan bahwa program pemberdayaan yang berkonsentrasi pada pembangunan aset produktif dapat meningkatkan pendapatan dan menurunkan ketergantungan masyarakat pada bantuan eksternal. Dengan menggunakan metode kualitatif yang terdiri dari wawancara dan observasi, penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan aset yang ada sangat penting untuk keberhasilan program.

Selain itu, penelitian oleh Soemodiningrat & Adhi (2009) menunjukkan bahwa kerja sama antara pemerintah dan lembaga keuangan sangat kuat dalam mendukung inisiatif pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Dalam keadaan ini, lembaga keuangan berperan penting dalam menyediakan modal kepada masyarakat yang ingin memulai atau mengembangkan usaha. Penelitian ini juga menekankan perlunya pelatihan keterampilan dan kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan kapasitas individu dalam mengelola usaha mereka

Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan di Desa Teluk, Kabupaten Pandeglang, berfokus pada pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan kemandirian ekonomi melalui pembangunan industri lokal seperti perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa tersebut menghadapi masalah seperti ketergantungan pada cuaca dan kekurangan infrastruktur, meskipun memiliki potensi besar. Oleh karena itu, untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat setempat dianggap sangat penting.

Menurut penelitian Adi (2015), pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi kreatif dapat membantu meningkatkan kemandirian ekonomi. Studi ini menemukan bahwa membentuk kelompok masyarakat untuk mengelola usaha bersama dapat meningkatkan keterlibatan dan keberhasilan program pemberdayaan. Masyarakat dapat lebih mandiri dalam mengatasi masalah ekonomi mereka jika mereka menerima pelatihan dan dukungan dari berbagai pihak.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu atau kelompok dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya mereka, dengan melibatkan partisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program yang berhubungan dengan kehidupan mereka. Menurut Korten (1987), pemberdayaan masyarakat tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan politik. Proses ini mendorong masyarakat untuk bersikap proaktif, menjalin keputusan yang berkaitan dengan pembangunan. Dengan demikian, pemberdayaan merupakan pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang mandiri dan mampu beradaptasi dengan perubahan, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas kehidupan individu dan kelompok dalam masyarakat secara keseluruhan.

Sen (1999) juga menyatakan bahwa pemberdayaan bertujuan memperluas pilihan hidup bagi individu, yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan yang lebih baik untuk kesejahteraan mereka. Selain itu, Nussbaum menekankan urgensi peningkatan kemampuan masyarakat untuk membuat pilihan hidup yang mereka anggap berharga, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup mereka (Nussbaum, 2000).

Friedmann (1992) berpendapat bahwa pemberdayaan mencakup kemampuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka, serta mengurangi ketimpangan kekuasaan. Chambers (1997) menambahkan bahwa pemberdayaan terjadi ketika masyarakat memiliki kendali atas proses pembangunan dan perubahan sosial yang mereka alami, dengan partisipasi aktif dalam perubahan tersebut.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat sangat esensial dalam menciptakan masyarakat yang mandiri dan mampu beradaptasi dengan perubahan, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Kemandirian Ekonomi

Kemandirian ekonomi masyarakat merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa bergantung pada bantuan eksternal. Duflo dan Banerjee (2011) menyatakan bahwa

kemandirian ekonomi lebih dari sekadar peningkatan pendapatan, tetapi mencakup peningkatan keterampilan yang dapat membantu individu dan kelompok untuk lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, sehingga mereka dapat menghasilkan produk atau layanan yang bernilai tambah (Duflo dan Banerjee, 2011), pendidikan yang baik, sehingga masyarakat dapat lebih memahami pasar, mengelola keuangan pribadi, dan mengembangkan usaha mandiri (Intan, 2022), dan kesehatan yang layak, masyarakat memiliki produktivitas yang lebih tinggi dan mampu bekerja secara optimal. Demikian, semua aspek tersebut berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Sen (1999) berpendapat bahwa kemandirian ekonomi juga melibatkan kebebasan untuk membuat pilihan dan keputusan, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup dan potensi individu. Sementara itu, Moser (1998) menekankan pentingnya akses terhadap sumber daya dan peluang untuk mengelola sumber daya tersebut secara efektif, sehingga masyarakat dapat menjadi lebih mandiri dalam menghadapi perubahan ekonomi.

Schumacher (1973) dalam bukunya *Small is Beautiful* juga menyoroti pengelolaan sumber daya lokal secara bijaksana dan efisien untuk mencapai kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Terakhir, Perera (2003) menambahkan bahwa kemandirian ekonomi memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif dalam kehidupan sosial dan politik, serta mendorong pemberdayaan dalam berbagai aspek kehidupan.

Kesimpulannya, kemandirian ekonomi masyarakat tidak hanya berkaitan dengan aspek pendapatan, tetapi juga mencakup pendidikan, keterampilan, akses terhadap sumber daya, serta kebebasan untuk membuat keputusan strategis. Masyarakat yang mandiri mampu mengelola sumber daya secara efisien, menghadapi tantangan ekonomi, dan aktif dalam kehidupan sosial-politik, yang berkontribusi pada pemberdayaan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah studi kasus (Hamel *et al* 1993; Yin, 2003; Flyvbjerg, 2011; Yin *et al* 2012; Hollweck, 2015; Feagin *et al* 2016; Tellis,

1997; Sjoberg *et al* 2020), yang berfokus pada analisis kemandirian ekonomi warga di Semper Barat dalam konteks program PPMK. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan dan observasi langsung terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan data sekunder meliputi dokumen-dokumen terkait program PPMK, laporan kegiatan, dan literatur yang relevan mengenai kemandirian ekonomi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis menggunakan teknik triangulasi data (Agusta, 2003; Susanto & Jailani, 2023; Nurfajriani *et al* 2024) yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber, metode, atau teori untuk memvalidasi hasil dan mengurangi potensi bias (Rifa'i, 2023; Pugu *et al* 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Program PPMK dengan Kemandirian Ekonomi

PPMK bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan, penyediaan modal usaha, serta peningkatan akses terhadap pasar. Dengan pemberian akses terhadap sumber daya dan pelatihan yang relevan, program ini mendukung terciptanya usaha-usaha kecil yang dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada pihak luar. PPMK berperan dalam membentuk masyarakat yang memiliki kemampuan untuk menciptakan dan mengelola usaha secara mandiri, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemandirian ekonomi di tingkat lokal.

PPMK memfasilitasi terbentuknya jaringan usaha yang saling mendukung, memperkenalkan inovasi produk, serta membuka peluang pasar baru. Dengan demikian, hubungan antara PPMK dan kemandirian ekonomi terletak pada upaya bersama untuk memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan akses terhadap modal serta pasar.

Proses Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan

Proses pemberdayaan yang terjadi melalui PPMK melibatkan peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat secara menyeluruh. Melalui pelatihan yang diberikan, warga tidak hanya belajar keterampilan praktis, tetapi juga mendapatkan wawasan mendalam tentang pentingnya manajemen keuangan dan strategi pemasaran yang efektif. Pelatihan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat Semper Barat, dengan mempertimbangkan potensi lokal dan tren pasar yang ada.

Hasil wawancara dengan peserta pelatihan menunjukkan bahwa mereka merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan dalam berwirausaha. Banyak dari mereka melaporkan bahwa pelatihan ini memberikan mereka alat dan teknik yang diperlukan untuk mengelola usaha mereka dengan lebih baik. Misalnya, pelatihan komputer, manajemen keuangan, pemasaran produk, dan dana bergulir (Erniyati, 2010). Proses ini menciptakan siklus positif di mana peningkatan keterampilan berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan pendapatan. Ketika warga mampu mengelola usaha mereka dengan lebih efisien dan efektif, hasilnya adalah peningkatan pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Hal ini juga mendorong mereka untuk berinvestasi kembali dalam usaha mereka, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat ekonomi lokal.

Usaha Mandiri yang Dikelola oleh Warga

Hasil dari program PPMK dapat dilihat dari banyaknya usaha mandiri yang berhasil didirikan oleh warga setelah mengikuti pelatihan. Berbagai jenis usaha telah muncul, mulai dari warung makanan hingga jasa *laundry* dan bank sampah karya peduli (Asri, 2011). Observasi menunjukkan bahwa banyak dari usaha ini tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang seiring waktu.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa program PPMK telah berhasil menciptakan peluang bagi warga untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Dengan adanya usaha mandiri, warga tidak lagi sepenuhnya bergantung pada bantuan sosial atau pekerjaan informal yang tidak stabil. Mereka memiliki kontrol lebih besar atas

sumber pendapatan mereka dan dapat merencanakan masa depan dengan lebih baik.

Dalam konteks ini, penting untuk menyoroti bagaimana keberhasilan usaha-usaha ini berdampak pada komunitas secara keseluruhan. Usaha yang berkembang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal. Misalnya, warung makanan yang sukses dapat menciptakan lapangan kerja bagi anggota keluarga atau tetangga, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar lingkungan tersebut.

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat

Beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, antara lain:

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam program menjadi salah satu indikator keberhasilan. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin besar kemungkinan program mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal sangat diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan.
3. Ketersediaan sumber daya, baik itu modal keuangan, infrastruktur, maupun informasi, juga memengaruhi keberhasilan program pemberdayaan (Rukmini, 2019).

Dukungan dari pemerintah sektor swasta, dan organisasi masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan ekonomi masyarakat (Wibowo *et al*, 2024).

Adapun peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat Semper Barat terlihat sebagai hasil dari PPMK. Banyak informan melaporkan bahwa mereka kini mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka tanpa bergantung pada pihak luar (Erniyati, 2010 dan BPMPD DKI Jakarta). Hal ini mencerminkan perubahan signifikan dalam pola pikir masyarakat mengenai kemandirian ekonomi.

Program ini juga berkontribusi pada pengurangan ketergantungan terhadap bantuan sosial pemerintah. Warga merasa lebih percaya diri dan memiliki kontrol lebih besar atas kehidupan ekonomi mereka (Lembaga Penelitian

Sosial dan Ekonomi). Dengan meningkatnya kemandirian ekonomi, masyarakat Semper Barat dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah mereka. Namun, meskipun hasil jangka pendek terlihat positif, penting untuk mempertimbangkan keberlanjutan kemandirian ekonomi ini di masa depan. Kemandirian ekonomi tidak hanya bergantung pada keberhasilan individu dalam menjalankan usaha tetapi juga pada dukungan sistemik dari pemerintah dan lembaga terkait lainnya.

Meskipun PPMK bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, pelaksanaan program ini sering kali menghadapi berbagai kendala, antara lain:

1. Beberapa masyarakat tidak menyadari pentingnya program ini atau enggan berpartisipasi karena berbagai alasan.
2. Keterbatasan dalam hal dana, tenaga pe-
lajar, dan fasilitas pelatihan dapat menghambat implementasi program (Pramita *et al* 2022).
3. Birokrasi yang tidak efisien dan lambat dapat menghambat akses masyarakat terhadap sumber daya yang diperlukan.

Terkadang, ada stigma atau persepsi negatif terhadap program pemberdayaan yang dapat menghalangi partisipasi aktif masyarakat (Sari & Hotimah, 2023).

KESIMPULAN

Program PPMK memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dengan memberikan pelatihan keterampilan, akses modal usaha, serta membuka peluang pasar yang lebih luas. Melalui pemberdayaan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat lokal, program ini mendorong terbentuknya usaha mandiri yang berkelanjutan. Hasil dari program ini menunjukkan bahwa banyak peserta yang berhasil mengelola usaha secara efektif, meningkatkan pendapatan mereka, dan mengurangi ketergantungan pada pihak luar. Selain itu, adanya jaringan usaha yang saling mendukung memperkuat ekonomi lokal dan menciptakan efek berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Meskipun program ini membawa dampak positif, terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta kendala birokrasi yang menghambat efektivitas program. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah, sektor swasta, serta organisasi masyarakat sangat penting untuk memastikan keberlanjutan kemandirian ekonomi yang telah terbentuk. Keberhasilan program PPMK tidak hanya bergantung pada individu yang menjalankan usaha, tetapi juga pada sistem pendukung yang mampu memberikan akses terhadap pelatihan, modal, dan pasar secara berkelanjutan. Dengan pendekatan yang lebih strategis dan inklusif, PPMK dapat terus menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat.

REFERENSI

- Adi, R. I. 2015. *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan) Suatu Pengantar*. PT Rajagrafindo. Jakarta
- Agusta, I., 2003. Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif. *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor*, 27(10), pp.179-188.
- Asri, S.P., 2011. *Pemberdayaan masyarakat melalui program pengelolaan sampah studi kasus: Program bank sampah di kelurahan semper barat, kecamatan cilincing, jakarta utara* (Skripsi, Universitas Negeri Jakarta).
- Banerjee, A.V. and Duflo, E., 2011. *Poor economics: A radical rethinking of the way to fight global poverty*. Public Affairs.
- Chambers, R., 1997. Responsible well-being—A personal agenda for development. *World development*, 25(11), pp.1743-1754.
- Erniyati. 2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) DI Kelurahan Semper Barat Jakarta Utara* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Feagin, J.R., Orum, A.M. and Sjoberg, G. eds., 2016. *A case for the case study*. UNC Press Books.

- Flyvbjerg, B., 2011. Case study. *The Sage handbook of qualitative research*, 4, pp.301-316.
- Friedmann, J., 1992. *Empowerment: The politics of alternative development*. John Wiley & Sons.
- Hamel, J., Dufour, S. and Fortin, D., 1993. *Case study methods* (Vol. 32). Sage publications.
- Hollweck, T., 2015. Robert K. Yin. (2014). Case Study Research Design and Methods . *Canadian Journal of Program Evaluation*, 30(1), pp.108-110.
- Koordinator, K., 2021. *Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia*
- Korten, D.C., 1987. Third generation NGO strategies: A key to people-centered development. *World development*, 15, pp.145-159.
- Maghfiroh, A.P., Yudha, A.T.R.C., Pradessari, A. and Astuti, S.A.D., 2021. Kemandirian Ekonomi Masyarakat Desa Berbasis Pemanfaatan Aset Produktif di Kabupaten Mojokerto. *Cakrawala*, 15(2), pp.139-152.
- Moser, C.O., 1998. The asset vulnerability framework: reassessing urban poverty reduction strategies. *World development*, 26(1), pp.1-19.
- Nurfajriani, W.V., Ilhami, M.W., Mahendra, A., Afgani, M.W. and Sirodj, R.A., 2024. Triangulasi data dalam analisis data kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wabana Pendidikan*, 10(17), pp.826-833.
- Nussbaum, M., 2000. Women's capabilities and social justice. *Journal of human development*, 1(2), pp.219-247.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
- Perera, V., 2003. Globalization from Below and New Political Identities: The Case of the World Social Forum. *Journal of Economic & Social Research*, 5(1). pp. 73-92
- Pramita, G., Saniati, S., Assuja, M.A., Kharisma, M.P., Hasbi, F.A., Daiyah, C.F. and Tambunan, S.P., 2022. Pelatihan Sekolah Tangguh Bencana Di Smk Negeri 1 Bandar Lampung. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 3(2), pp.264-271.
- Pugu, M.R., Riyanto, S. and Haryadi, R.N., 2024. *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Puspitasari, E.M., 2024. Peran Ketua RT dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Abdimas Universitas Insan Pembangunan Indonesia*, 2(2), pp.6-11.
- Rifa'i, Y., 2023. Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 1(1), pp.31-37.
- Rukmini, R., 2019. Pemberian Stimulasi dan Perkembangan Motorik Anak Usia 1-3 tahun di Kelurahan Krembangan Kecamatan Morokrembangan Surabaya. *Jurnal Ners LENTERA*, 7(1), pp.45-52.
- Sari, A.F. and Hotimah, N., 2023. Analisis Feminis terhadap Peran Perempuan dalam Konteks Keagamaan Islam. *AL MUNTADA*, 1(2), pp.100-113.
- Schumacher, E. F. 1973, *Small Is Beautiful; Economics as If People Mattered*. Harper & Row, New York
- Sen, A., 1999. Health in development. *Bulletin of the World Health Organization*, 77(8), p.619.
- Sjoberg, G., Orum, A.M. and Feagin, J.R., 2020. *A case for the case study*. The University of North Carolina Press.
- Statistik, B.P., 2023. *Statistik Indonesia 2003*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Sumodiningrat, G. and Adhi, A.S., 2009. *Mewujudkan kesejahteraan bangsa: menanggulangi kemiskinan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat*. Elex Media Komputindo. Jakarta

- Susanto, D. and Jailani, M.S., 2023. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), pp.53-61.
- Tellis, W., 1997. Introduction to case study. *The qualitative report*, 3(2), pp.1-14.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Wibowo, G.A., Awaluddin, A., Triyono, B., Surya, A. and Sukardi, S., 2024. Strategi Pengembangan Koperasi Mandiri sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *JIPM: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 2(2), pp.75-82.
- Yin, R.K., 2003. Designing case studies. *Qualitative research methods*, 5(14), pp.359-386.
- Yin, R.K., Clarke, C., Cotner, B. and Lee, R., 2012. Case study methods. In *Handbook of complementary methods in education research* (pp. 111-122). Routledge.